

**HUBUNGAN ANTARA SIKAP MENGENAI INSTRUKSI
WALIKOTA TENTANG KEWAJIBAN BERJILBAB DENGAN
PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT NON MUSLIM
DALAM PILKADA KOTA PADANG TAHUN 2008**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas**

Oleh:

**RIDHA FATMA SARI
BP. 04 193 016**



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

ABSTRACT

Ridha Fatma Sari, 04193026, The Correlation Between of Attitude Concerning Mayor Instruction of No. 451.422/Binsos-III/2005 about The Obligation of Using Veil with Voting Behaviour of Padang's Non Muslim Society in Regional Election at Padang 2008, Sepervisor I Drs. Bakaruddin Rosyidi, MS. Dan II Sepervisor Drs. Syaiful, M.Si. Faculty of Social Science and Politics, University of Andalas, Padang, July 2009.

This research entitles Hubungan Antara Sikap Mengenai Instruksi Walikota No. 451.422/Binsos-III/2005 tentang Kewajiban Berjilbab dengan Perilaku Memilih Masyarakat Non Muslim Dalam Pilkada Kota Padang Tahun 2008. The Background of this research is the prudence of government that determine about religious in society especially for non-Muslim, and it has relationship with the regional election in Padang. Fauzi Bahar as candidate incumbent, introduces the phenomenally prudence. The prudence determine about wearing the veil. The aim of this research is to analyze whether the prudence above give some impacts to the behaviours of non-Muslim communities in choosing on regional election.

In conducting analysis, the writer uses the voting behaviours theory; socio-psychological sects. This sect use three approaches, one of them is approach that orient to candidate of parliamentarian. This research also uses the concept of attitude or political concept. This concept is formed by three components, that influence each other, they are kognisi (knowledge), afeksi (understanding of), and konasi (assessment).

The research uses quantitative research method. The data are taken from questioners with the explanative research type using two variable (bifariat). Scale used is ordinal and test the hypothesis by using the Spearman Rank (Rho). In taking sample, the writer uses the Purposive Sampling for the determination of regional population and Simple Random Sampling to determine the amount of sample or responder that is gone in the round of Padang Barat.

From analysis of data obtained about the correlation of attitude with voting behaviour, the writer finds a weak among both of the variables. Even though H1 (job hypothesizing) can be replied by data acquirement. There are correlation the mayor prudence of government with behaviour chosen in the society, in this term the writer discusses about the behaviour of non-Muslim in regional election in Padang.

Keyword : Correlation, Political Attitude and Voting Behaviour

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsep pemerintahan daerah atau pemerintahan otonom pada awal kemerdekaan diperkenalkan melalui pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 yang menyinggung tugas-tugas Komite Nasional Wilayah. Kemudian menyusul Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 menggantikan undang-undang sebelumnya. Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1945 pemerintah kembali berusaha memperbaiki kebijaksanaan desentralisasi yang diwujudkan melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965. Bentuk pemerintahan otonom yang nyata dan bertanggung jawab diperkenalkan pada masa orde baru melalui pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1945 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Kemudian menyusul Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat Dan Daerah, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.¹ Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada daerah kabupaten dan kota untuk mewujudkan pemerintahan otonom yang nyata dan bertanggung jawab. Sistem ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah perimbangan kekuasaan antara pemerintahan pusat dan daerah, dan untuk menciptakan penyebaran pembangunan secara merata di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sedangkan tujuan

¹Sarundajang, S.H, *Pemerintahan Daerah Di Berbagai Negara Sebagai Pengantar (Tinjauan Khusus Pemerintahan Daerah Di Indonesia: Perkembangan, Kondisi, dan Tantangan)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm:189-192

praktisnya adalah untuk mengkoordinasikan dan merekonsiliasikan perbedaan-perbedaan antar daerah dalam hubungannya dengan kebutuhan wilayah yang lebih luas atau sasaran-sasaran penting lainnya yang bersifat regional atau nasional.²

Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur dan merumuskan kebijakan yang sesuai untuk masyarakat daerah itu sendiri. Banyak daerah-daerah yang telah memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan kualitas daerah masing-masing. Peraturan daerah yang paling fenomenal dan banyak diberitakan orang adalah kebijakan tentang syariah, yaitu suatu kebijakan yang hendak mengatur akhlak masyarakatnya berdasarkan ajaran Islam. Walaupun di dalam peraturan ini sendiri tidak secara jelas disebutkan peraturan tersebut sebagai Perda Syariah, namun pada kenyataannya peraturan ini tetap disebut sebagai Perda Syariah oleh banyak orang. Adapun daerah-daerah yang telah mengeluarkan kebijakan ini adalah daerah Aceh, beberapa daerah di Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Sulawesi.

Di propinsi Sumatera Barat sendiri terdapat beberapa daerahnya yang telah menerapkan Peraturan Daerah ini dalam berbagai bentuk, misalnya Peraturan Daerah di Kabupaten Solok (Perda No. 10 Tahun 2001 tentang Pandai Baca Huruf Al-quran Bagi Murid SD, Siswa SLTP, Dan SLTA Serta Calon Pengantin), Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (Perda No. 1 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-quran Bagi Anak Usia Sekolah, Karyawan/Karyawati Dan Calon Mempelai, Perda No. 2 Tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim Dan Muslimah), Kabupaten Lima Puluh Kota (Perda No. 5 Tahun 2003 tentang

²Ibid, hlm :199

Kewajiban Berpakaian Muslim Dan Muslimah, Perda No. 6 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pandai Baca Dan Tulis Al-Quran Bagi Anak Sekolah Dan Calon Pengantin), Kabupaten Pesisir Selatan (Perda No. 08 Tahun 2004 tentang Kewajiban Pandai Baca Dan Tulis Al-quran Dan Mendirikan Sholat Bagi Anak Sekolah Dan Calon Pengantin Yang Beragama Islam), dan Kabupaten Pasaman (Perda No. 22 Tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim Dan Muslimah Bagi Siswa, Mahasiswa Dan Karyawan). Masing-masing daerah ini membuat perda diatas berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian telah direvisi menjadi UU No. 34 Tahun 2004.

Lain halnya dengan yang terjadi di Kota Padang, Walikota Padang Fauzi Bahar mengimplementasikan peraturan ini dalam bentuk Instruksi Walikota. Instruksi walikota ini merupakan terjemahan dari Perda anti-maksiat yaitu Peraturan Daerah Propinsi No. 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Maksiat yang telah disahkan oleh DPRD dan Pemerintahan Kota Padang. Walau hanya berupa Instruksi Walikota yang tidak memiliki sangsi apapun, jika tidak diikuti akan tetap memiliki kekuatan hukum, seperti yang tercantum di dalam UU No. 10 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat (4) yang berbunyi, "jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi." Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:³

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang;
3. Peraturan Pemerintah;

³UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Prosedur Perundang-Undangan

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Sikap politik merupakan kecenderungan untuk bertindak yang didorong oleh pengetahuan, pemahaman dan penilaian terhadap suatu objek politik. objek politik dalam penelitian ini adalah aktor politik yaitu Fauzi Bahar dan kebijakan politik yaitu instruksi. Sikap individu atau kelompok yang dipengaruhi oleh objek politik akan mempengaruhi perilaku terhadap objek politik tersebut dalam hal ini adalah perilaku memilih terhadap Fauzi Bahar atau aktor politik.

Mengacu pada tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan hubungan antara sikap mengenai instruksi walikota no. 451.422/Binsos-III/2005 tentang kewajiban berjilbab dengan perilaku memilih masyarakat non muslim dalam Pilkada Kota Padang Tahun 2008. Maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut;

Dilihat dari tingkat pengetahuan dan pemahaman responden terhadap instruksi tentang kewajiban berjilbab dengan sikap masyarakat non muslim terhadap instruksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang kurang baik terhadap instruksi, menggambarkan kelompok masyarakat yang kurang mendapatkan informasi yang baik mengenai instruksi tentang kewajiban berjilbab tersebut. Sehingga hal tersebut memunculkan sikap yang negatif dari masyarakat terhadap instruksi kewajiban berjilbab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Chilcote, Ronald H. 2004. *Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Paradigma*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kavanagh, Denis. 1983. *Political Science And Political Behavior*. London:George allen & Unwin.
- Sarundajang, S. H. 1997. *Pemerintahan Daerah Di Berbagai Negara Sebagai Pengantar (Tinjauan Khusus Pemerintahan Daerah Di Indonesia: Perkembangan, Kondisi, dan Tantangan)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press

Buku Metode

- Agung Nugroho, Bhuono. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS*. Yogyakarta. Penerbit ANDI
- Riduwan, M.B.A, H. Hunarto, M.Si. 2007. *Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis*. Bandung: ALFABETA
- Suyanto, Bagong. Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana
- Singarimbun, Masri. Effendi, Sofian. 1989. *Metode Penelitian Survei (edisi revisi)*. Jakarta: LP3ES
- Triton PB. 2005. *SPSS 13 Terapan Riset Statistik Parametrik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Prasetyo, Bambang. Miftahul Jannah, Lina. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif. Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Widodo, T. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press